

ABSTRAK

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan pembebasan lahan di Desa Kertajati, Desa Bantarjati, dan Desa Kertasari serta Desa Sukamulya di kawasan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka belum optimal, disebabkan ada satu desa yang menolak pembebasan tanah untuk pembangunan Bandar Udara Internasional Jawa Barat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan konsep baru yang memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Kebijakan Publik, khususnya Implementasi Kebijakan Publik dalam konteks pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur, Bandar Udara Internasional Jawa Barat.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mendalami makna dari satu fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dokumentasi, serta triangulasi, sehingga dapat diperoleh data dan informasi yang mendukung tujuan studi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembebasan lahan yang mengandung unsur konten kebijakan masih perlu diperkuat oleh penegasan komitmen semua pihak serta perhatian terhadap persepsi dan ekspektasi masyarakat setempat. Sedangkan dalam hal konteks pelaksanaan perlu diperkuat oleh peningkatan dan penyesuaian strategi dalam pembebasan lahan serta sinergitas lembaga, bidang dan program pembangunan lainnya.

ABSTRACT

The problem studied in the research is policy implementation on land exemption in Kertajati, Bantarjati, Kertasari and Sukamulya Villages, Majalengka District which is considered not optimal, due to the disagreement of some people in one village toward the land exemption for West Java International Airport construction.

This research aims at developing a new concept to give some contribution to the development of Public Policy, particularly to the implementation of Public Policy in the context of land exemption for infrastructures construction, that is West Java International Airport.

The research uses descriptive method and qualitative approach to explore the meaning of the happening phenomenon. Technically, data collection is conducted by indepth interview, participative observation, documentation and triangulation to get data and information supporting the research's purposes.

The result of this research indicates that the implementation of land exemption policy, which contains of content of policy still get to be strengthened by commitment affirmation, as well as concern for people perception and expectation. While the context of implementation still needs some strategic improvements and adjustment in land exemption and also synergy on institution, field and other development programs.